



Implementasi Pendidikan Inklusi Di SDN K1 Kabupaten Karawang

Jayadi, Asep Supena
Program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
email: abifaiz.2011@gmail.com, asupena@unj.ac.id

Received: 23 August 2022; Revised: 12 October 2022; Accepted: 17 December 2022
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.9.1.725-736.2023>

Abstract

The concept of inclusive education appears intended to provide a solution to discriminatory treatment in education services, especially for children with disabilities or children with special needs. Not many schools understand how to implement it by involving several communities in order to achieve adequate inclusive education. The purpose of this research is to provide a description of the implementation and problems in inclusive education programs. This research is a qualitative descriptive study using data collection in the form of interviews, observation and documentation. The results of this study are that the implementation model for the implementation of the inclusive education program is going well by making learning tools, implementing inclusion and also evaluating it. While the problem that arises is the lack of understanding from the community and parents about inclusive education so that its implementation needs to be optimized. Human resources owned by schools are still lacking so that they are not optimal in carrying out inclusive education activities and providing services to children with special needs.

Keywords: Implementation. Education, Inclusion, ABK

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberi solusi atas perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Belum banyak sekolah yang memahami bagaimana implementasi yang sesuai dengan melibatkan beberapa komunitas demi tercapainya pendidikan inklusif yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi mengenali implementasi dan permasalahan dalam program pendidikan inklusi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah model implementasi pelaksanaan program pendidikan inklusi berjalan dengan baik dengan membuat perangkat pembelajaran, pelaksanaan inklusi termasuk dan juga evaluasi. Sedangkan permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahamannya dari masyarakat dan orang tua tentang pendidikan inklusi sehingga pelaksanaannya perlu dioptimalkan. Sumber daya manusia yang dimiliki sekolah masih kurang sehingga belum optimal dalam melakukan kegiatan pendidikan inklusi dan memberikan Pelayanan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.

Kata Kunci: Penerapan. Pendidikan, Inklusi, ABK



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sekolah sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan hendaknya memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya dalam menerima semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi keharusan bagi setiap negara sebagai perwujudan dari hasil konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan inklusif di Bangkok tahun 1991 yang menghasilkan pendidikan untuk semua (*education for all*). Pendidikan inklusif telah menjadi agenda internasional di antaranya melalui SDGs yang mengamanatkan agar semua anak tanpa kecuali dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi agenda utama dalam pendidikan untuk semua di satuan pendidikan reguler. Indonesia merespon *Education for all*, dengan menetapkan kebijakan penyelenggaraan sekolah inklusif. Di Indonesia, praktik pendidikan inklusif telah berkembang pesat sejak tahun 2003 dan sampai sekarang telah tercatat lebih dari 36.000 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009). Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama- sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Sementara itu Sapon-Shevin (O Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus di didik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995). Hal ini dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak tidak normal (berkebutuhan khusus) yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas sosial.

Konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberi solusi atas perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Anak-anak cacat atau anak-anak berkebutuhan khusus tak harus diarahkan agar hanya mengenyam pendidikan dalam lingkup terbatas Sekolah Luar Biasa (SLB). Mereka diberi hak mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah umum.

Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin dalam Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Dalam undang undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik



berlainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Maka pendidikan inklusif diupayakan untuk diintegrasikan dalam pendidikan reguler.

Dinas pendidikan kabupaten/kota telah menerapkan pendidikan inklusi, salah satunya program pendidikan inklusi tersebut diimplementasikan di Sekolah Dasar Negeri K1 Kabupaten Karawang. Kegagalan dan keberhasilan pada sekolah dengan program pendidikan inklusi dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah salah satunya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Maka dari itu dibutuhkan para pemimpin dan implementator yang mampu dan bersedia melaksanakan kebijakan program pendidikan inklusi tersebut. Apabila kebijakan tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi kesenjangan implementasi di lapangan yang artinya ada perbedaan antara hukum yang tertulis dan praktik kebijakan di lapangan atau sekolah (Supriatini et al., 2020). *Implementation gap* dapat terjadi karena adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah. Dalam mengatasi *Implementation gap* diperlukan pendekatan dan upaya yang berfokus pada kualitas kebijakan sejalan dengan praktik di lapangan, sesuai dengan kebutuhan sasaran masyarakat (Sulthon, 2019).

Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan sekolah dapat mengelola kelas inklusi secara optimal dengan mengupayakan keterlibatan semua komponen komunitas sekolah, yang meliputi siswa reguler, guru kelas, guru pendamping khusus/shadow, orangtua siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler (Ni'matuzahroh & Nurhamida, 2013). Orang tua siswa berkebutuhan khusus merupakan mitra utama bagi sekolah untuk membangun komunitas sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus sebagai bagian penting sekolah yang harus mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti telah menyusun draft buku Psanduan Pengelolaan Sekolah Inklusi Berbasis Komunitas (Ni'matuzahroh dan Nurhamida, 2014).

Program pendidikan inklusi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepala sekolah dan guru bahkan masyarakat. Pendidikan inklusi di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat siswa sekolah dasar yang masih perlu perhatian intensif dari pendidik ditambah dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, tentunya hal tersebut bukan hal mudah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi memerlukan kesiapan sekolah yang meliputi: aspek pengajar yang kompeten, kurikulum yang berdiferensiasi sesuai dengan kapasitas siswa ABK, kesadaran dan pemahaman teman sebaya dan orang tuanya tentang kehadiran siswa ABK di sekolah. Dalam analisis teori dalam pedoman pendidikan inklusi dijelaskan bahwa ruang lingkup atau komponen manajemen pendidikan inklusi antara lain meliputi: a) peserta didik, b) kelembagaan, c) kurikulum, d) ketenagaan, e) pembiayaan. Pada hakikatnya layanan pendidik inklusi merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk yang berbeda dan unik. Sehingga interaksi manusia antara satu dengan lainnya juga pasti berbeda. Hal ini merupakan fitrah yang diberikan oleh Tuhan baik dari segi kecerdasan, emosi, maupun spiritualnya. Begitu pula dalam bidang pendidikan.

Tujuan penelitian adalah untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri K1 Kabupaten Karawang



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri K1 Kabupaten Karawang. Penelitian ini memanfaatkan berbagai strategi dan teknik menggunakan data kualitatif berdasarkan pada wawancara pada stakeholder sekolah seperti kepala sekolah, dan guru kelas. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang penerapan pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Adapun akhir pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan telaah dokumentasi keperluan bahan analisis data. Data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, angket, wawancara, dan observasi terhadap objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi pelaksanaan pendidikan inklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

a. Peserta Didik

1. Penerimaan Peserta didik

OW1 : Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dan Guru di SDN K1 Kab Karawang jumlah peserta didik yang termasuk ABK berjumlah 9 orang dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1. Sebaran Peserta Didik ABK

No	Kelas	Jumlah	Jenis ABK
1	I	2	Tunagrahita
2	II	1	Slow learner
3	III	2	Slow learner
4	IV	1	Slow learner
5	V	1	Tunadaksa
6	VI	2	Slow learner
Jumlah		9	

Proses penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus dilaksanakan sama dengan peserta didik yang normal dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan , sebagai berikut:

a. Tujuan

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

b. Asas

Asas pelaksanaan PPDB adalah objektif, transparan (terbuka) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus di rancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.



c. Persyaratan Usia

- *Usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.*
- *Usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. dan di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.*
- *Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas*

2. Identifikasi dan Assmen

Identifikasi penting dilakukan karena hasilnya menentukan proses selanjutnya yaitu kegiatan Asesmen. Kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non akademik (perkembangan) dan kekhususan secara lengkap, akurat dan obyektif. Asesmen berfungsi untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal (*baseline*) anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Informasi yang diperoleh guru (*screening*) dapat digunakan untuk mengetahui peserta didik yang diduga sebagai disabilitas/berkebutuhan khusus.

OW2: *Identifikasi dan Asesmen terhadap Peserta didik dengan kebutuhan khusus di SDN K1 Kab Karawang dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi Pendidikan Luar Biasa dan bekerjasama dengan guru kelas.*

3. Kurikulum

OW3: *Bedasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala sekolah dan guru di SDN K1 Kabupaten Karawang, menerapkan model kurikulum duplikasi dan modifikasi. Model kurikulum duplikasi adalah kurikulum untuk PDBK yang disamakan dengan kurikulum peserta didik reguler, sedangkan kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang diubah agar sesuai dengan kemampuan PDBK. Sehingga sekolah memberikan layanan akomodasi yang layak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik.*

4. Pembelajaran

SDN K1 Kabupatena Karawang menerapkan prinsip-prinsip dalam akomodasi pembelajaran antara lain memberi peluang kepada PDBK untuk berpotensi pada bidangnya, mengembangkan kecerdasan majemuk, mempertimbangkan multisensori, multimedia dan multisumber, adanya motivasi dan penerimaan guru dan antar peserta didik, mengajar untuk seluruh peserta didik, mengajarkan cara belajar dan mempertimbangkan ketahanan belajar peserta didik.

OW4.1: *Bedasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala sekolah dan guru di SDN K1 Kabupaten Karawang bahwa Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilaksanakan bersamaan dengan anak yang normal, PDBK ditempatkan di paling depan agar guru bisa mengontrol dan*

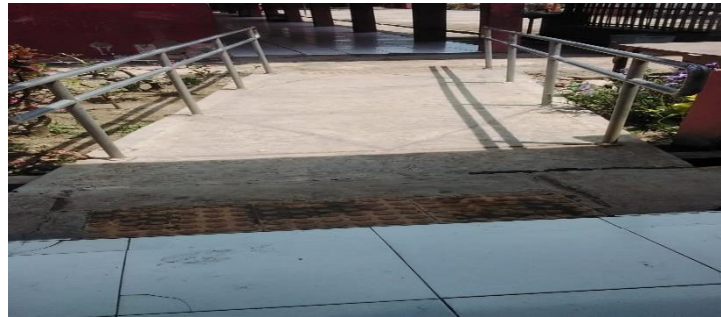


memberikan pelayanan yang optimal kepada PDBK, di hari-hari tertentu PDBK juga menerima pelayanan pembelajaran di ruang khusus oleh guru yang memiliki kompetensi Pendidikan Luar Sekolah dan guru yang sudah mengikuti diklat Pendidikan Inklusi

- OW4.2: *Akomodasi materi peserta didik Tunagrahita disajikan secara konkrit, bermakna, fungsional dan kontekstual dan seterusnya*
- OW4.3: *Proses pembelajaran yang dilakukan memberikan kesempatan agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar di kelas bersama dengan teman-temannya. Pendekatan kolaborasi dan kooperatif merupakan strategi yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan pemahaman peserta didik menghubungkan konsep yang sedang dipelajari dengan kondisi nyata dalam kehidupan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memahami konsep yang dipelajarinya.*
- OW4.4: *Penilaian dipengaruhi oleh diferensiasi dan modifikasi kurikulum yang digunakan sehingga mengakomodasi kebutuhan belajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang beragam. KKM dan capaian pembelajaran bagi seluruh peserta didik sama. Namun, indikator pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan karakteristik dan/atau kebutuhan belajarnya.*
- OW4.5: *Penetapan Kenaikan Kelas dan Kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan catatan: 1) Capaian minimal ketuntasan pembelajaran dan nilai sikap/perilaku minimal baik, tidak berlaku pada peserta didik berkebutuhan khusus; 2) Kehadiran.*
- OW4.6: *Format rapor bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan format rapor yang berlaku di satuan pendidikan sebagaimana yang berlaku bagi peserta didik reguler lainnya. Nilai dan deskripsi dalam rapor bersifat individual, sesuai capaian masing-masing peserta didik. Artinya guru memberikan nilai dan deskripsi capaian kompetensi setiap individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan peserta didik.*
- OW4.7: *Ijazah Peserta didik berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah sebagai tanda kelulusan dan tidak dibedakan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler. Ketentuan ijazah adalah sebagai berikut: 1) Dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan dimana peserta didik belajar 2) blangko ijazah sama dengan peserta didik lainnya. 3) ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan ke satuan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. 4) kepala satuan pendidikan menyertakan surat keterangan tambahan ijazah yang mencantumkan jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus.*
5. Sarana Prasarana
- OW5: *Bedasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala sekolah dan guru di SDN K1 Kabupaten Karawang , memiliki 1 ruang khusus untuk pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus(ABK). Media pembelajaran untuk ABK juga tersedia. Sarana penunjang tersebut didapat dari bantuan pemertintah.*



Gambar 1. Ruang Belajar ABK



Gambar 2. Pegangan Rambat (handral)

6. Dukungan Orangtua /wali Siswa

OW6: *Bedasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala sekolah dan guru di SDN K1 Kabupaten Karawang, Sekolah selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk orangtua wali siswa yang tergabung dalam Komite Sekolah, termasuk untuk menangani siswa ABK. Namun karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, terlebih dengan adanya pandangan masyarakat mengenai stigma buruk yang masih melekat pada ABK dengan masih adanya anggapan anak ABK sering mengganggu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga orang tua hanya mempercayakan saja semua pada pihak sekolah.*

Dari hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi Pendidikan inklusi di SDN K1 Kabupaten Karawang, sudah selaras dengan konsep Pendidikan inklusi yang disampaikan dalam teori dan penelitian sebelumnya,

Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama, kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut mereka dapat berbaur serta berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam Untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik maka perlu menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu



keharusan. Peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki (Kadir, 2015).

Siswa yang tidak terbiasa bergaul dalam keragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat. Kebersamaan siswa di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi kesenjangan agar mereka terbiasa hidup dalam keragaman, sehingga mereka saling mengenal, mengetahui, dan memahami tentang keberadaan setiap individu. Anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran dalam hubungannya dengan peserta didik normal, demikian sebaliknya, bahwa peserta didik normal dapat belajar bagaimana mengembangkan sikap untuk bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus (Junanto & Kusna, 2018).

Interaksi antar siswa sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi pengenalan mereka di sekolah akan berlanjut pada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi antar siswa, dan terkadang melibatkan orang tua serta keluarga, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenjangan kehidupan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Model pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi pada jam belajar atau jam khusus konseling peserta didik dapat menjadi kesempatan upaya pengobatan atau terapi bagi siswa (Dewi, 2017).

Pendidikan inklusi merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami tekanan psikologis karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, merasa diterima dan tidak terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas siswa lebih aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Lembaga pendidikan yang dapat merangkul dan menerima keragaman seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan individu peserta didik yang beragam (Kadir, 2015). Konsep *education for all* (pendidikan untuk semua) mengisyaratkan perlunya sekolah serta lembaga pendidikan mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman serta mampu mendidik dan mengajar setiap individu sebagai akibat bahwa *human differences* dan *learning styles differences* dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan normal (Wati, 2014).

Implementasi kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar perlu ditinjau secara menyeluruh agar diketahui apakah pendidikan inklusi yang telah diterapkan sudah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan pengguna serta dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasi penerapannya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Nurwan, 2019). Implementasi pada Program Pendidikan dapat dikaji berdasarkan dua variabel menurut



Merilee S. Grindle, dua variabel tersebut adalah variabel Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukannya masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghambat jalannya proses implementasi program pendidikan inklusi di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan inklusi telah berjalan dengan baik sesuai dengan target sasaran yang hendak dicapai atas kerjasama kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat (Sudarto, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian (Tarnoto, 2016) permasalahan yang muncul terkait implementasi program pendidikan inklusi adalah kaitannya guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak. Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan inklusi, tetapi tanpa adanya bantuan dari pihak lain pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga selain guru yang ditangani, perlu juga menumbuhkan budaya sekolah inklusi baik didalam sekolah itu sendiri ataupun komunitas diluar sekolah tersebut, selain itu kebijakan pemerintah juga sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi. Dalam pelaksanaan sekolah inklusi perlu adanya persiapan layanan dan sarana prasarana yang menunjang serta dukungan dari pemerintah sehingga implemtasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat terimplementasi dengan baik (Muazza et al., 2018).

Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusi

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dapat diketahui faktor pendukung dari implementasi program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri K1 Kabupaten Karawang adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat untuk mendukung berjalannya program pendidikan inklusi. Kerjasama tersebut tercermin dalam kebijakan sekolah yang mendorong pelaksanaan program pendidikan inklusi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung tersebut menjadi keuntungan bagi sekolah dan lingkungan masyarakat serta siswa dalam berinteraksi, bersosialisasi dan toleran terhadap perbedaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Inklusi

Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi tentunya ada faktor penghambat yang menjadi sebuah tantangan bagi kepala sekolah dan guru, masih ada paradigma pandangan masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus sulit untuk ditangani, sehingga menimbulkan adanya komplain dari beberapa orang tua murid yang keberatan anaknya disatu kelaskan dengan anak berkebutuhan khusus. Faktor penghambat lainnya masih kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurikulum yang belum berreorientasi disusun untuk program sekolah inklusi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.



Upaya Kepala Sekolah dan Guru dalam Implementasi Pendidikan Inklusi

Lembaga sekolah dan dinas pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk menangani hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pendidikan inklusi. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya: 1) Sosialisasi yang dilakukan bersama komite sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran pada seluruh orang tua murid di sekolah dasar tersebut; 2) Pelatihan dan workshop mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus terus dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pada implementasi program pendidikan inklusi dan sebagai peningkatan kompetensi guru; 3) Pihak sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan mengadakan pelatihan pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi; 4) Sekolah terus berupaya melengkapi sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada sekolah inklusi, dengan bekerjasama dinas pendidikan melalui pemerolehan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan fasilitas pada sekolah inklusi.

Berdasarkan temuan penelitian dilihat dari faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi di sekolah dasar. Implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar masih perlu diteliti lebih lanjut. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar program tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai rancangan program dari pemerintah. Dalam penelitian ini masih terbatas pada implementasi program Pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri K1 Kabupaten Karawang, untuk mendapatkan data dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar tentunya masih banyak hal yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membentuk generasi penerus bangsa agar dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan serta menghindari sifat diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah Dasar Negeri K1 Kabupaten Karawang telah mengimplementasikan Pendidikan Inklusi walau belum optimal karena beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi Pendidikan inklusi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar. Penelitian ini berdampak bagi sekolah dasar negeri 1kabupaten Karawang untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan, sehingga upaya yang dilakukan sekolah selalu melakukan eflesidan evaluasi.

REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Model pembelajaran dan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pedoman Umum Penyelenggaraab Pendidikan Inklusif.
- Dewi, N. (2017). Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud. In *journal.uny.ac.id*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/15657>



- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Model pembelajaran dan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pedoman Umum Penyelenggaraab Pendidikan Inklusif.
- Junanto, S., & Kusna, N. A. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *INKLUSI*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.14421/ijds.050202>
- Kadir, A. (2015). PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA Abd. Kadir (Dosen PAI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya). *Pendidikan Agama Islam*, 03, 1–22.
- Muazza, M., Hadiyanto, H., Heny, D., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi Studi Kasus Di Sekolah Dasar Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12.
- Ni'matuzahroh dan Nurhamida, Y. (2013). Pengembangan Model pendidikan Inklusif berbasis komunitas tingkat Sekolah Dasar di Kota Malang (tahun I). Hibah Bersaing. DIKTI.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Sudarto, Z. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Zaini Sudarto Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Unesa Abstrak. *Jurnal Pendidikan*, 1, 89–97.
- Sulthon, S. (2019). Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. *INKLUSI*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.14421/ijds.060107>
- Supriatini, S., Muhdi, M., & Yuliejantiningasih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Bolo Kabupaten Demak. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(3), 410–425. <https://doi.org/10.26877/jmp.v8i3.5400>
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat Sd. *Humanitas*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v13i1.3843>
- O'Neil, J. (1994/1995). Can inclusion work? A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Educational Leadership*. 52(4)7-11
- Wati. (2014). MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 32 KOTA BANDA ACEH. In *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari* (Nomor 2). www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus



AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal
P-ISSN [2407-8018](#) E-ISSN [2721-7310](#) DOI prefix [10.37905](#)
Volume 09 (1) January 2023
<http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>